

BAB I

PENDAHULUAN

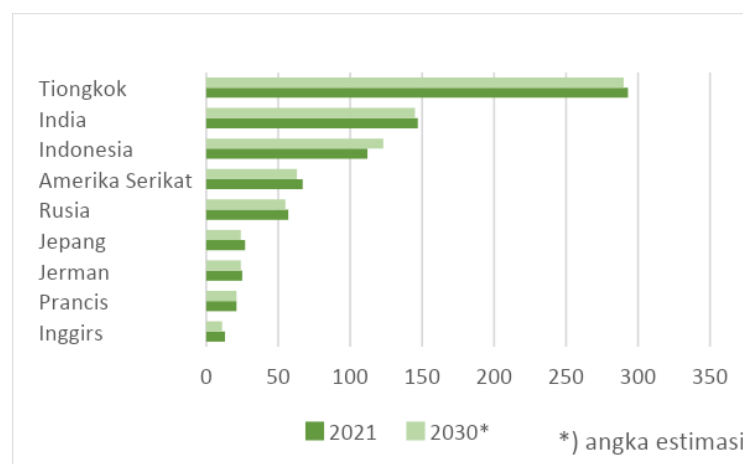
1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan institusi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam menyelenggarakan tugasnya, DJBC memiliki 6 (enam) fungsi utama yang salah satunya adalah membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2011).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa saat ini terdapat 3 (tiga) jenis objek cukai, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Banyaknya hasil dari pengolahan tembakau yang beredar di pasaran, ditambah dengan posisi Indonesia yang merupakan negara peringkat keempat sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, membawa konsekuensi dalam pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi tersebut terutama terkait dengan konsumsi Hasil Tembakau (HT). Pada tahun 2021, jumlah perokok di Indonesia mencapai 112 juta orang dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 123 juta orang pada 2030. Data tersebut menggambarkan sebuah anomali, dikarenakan mayoritas negara lainnya diproyeksikan akan mengalami penurunan jumlah perokok, sedangkan di Indonesia mengalami peningkatan.

Gambar I.1 Estimasi Jumlah Perokok di Sejumlah Negara Terpilih (2021-2030)



Sumber: databoks.katadata.co.id (2023)

Konsumsi rokok tentu memiliki berbagai dampak negatif baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Merokok telah terbukti berkaitan dengan 25 jenis penyakit yang memengaruhi berbagai organ tubuh manusia dan menyebabkan penyakit, seperti kanker paru-paru, bronkitis kronis, emfisema, dan berbagai penyakit mematikan lainnya (Wandita, 2020). Aditama (2012, dikutip dalam Wandita, 2020) menyatakan bahwa kebiasaan merokok adalah masalah serius

karena melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu konsumsi rokok haruslah dikurangi untuk meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok, instrumen cukai diberlakukan. Namun pengenaan cukai sebagai instrumen untuk mengurangi prevalensi merokok dihadapkan pada ancaman dari rokok ilegal. Pada tahun 2022, Bea dan Cukai melaporkan rokok ilegal meningkat sebesar 5,5 persen dan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 548,32 miliar. Peningkatan peredaran rokok ilegal tersebut harus diminimalisasi dengan penguatan penegakan hukum untuk melakukan penindakan rokok ilegal.

Salah satu satuan kerja vertikal di bawah DJBC adalah KPPBC TMP C Sumbawa yang menjalankan tugas pengawasan terhadap peredaran HT. Kegiatan pengawasan sendiri terdiri dari berbagai macam bentuk, salah satunya adalah pengawasan peredaran HT ilegal melalui kegiatan operasi pasar, sosialisasi HT ilegal, dan penindakan terhadap HT ilegal. Menurut data KPPBC TMP C Sumbawa, hingga 7 Desember 2023 telah dilakukan operasi penindakan HT ilegal sebanyak 135 kali dan hasil penindakan sebanyak 135 Surat Bukti Penindakan (SBP) dengan total 628.964 batang rokok ilegal dan 110.740 gram tembakau iris serta potensi kerugian negara sebesar Rp 666.531.962,00 (enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

Kegiatan pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilakukan KPPBC TMP C Sumbawa tentunya tidak terlepas dari adanya hambatan, tantangan, dan ancaman dalam pelaksanaannya. Belum adanya analisis strategi yang tepat, dapat mengakibatkan perencanaan kegiatan kurang berjalan secara efisien dan efektif.

Untuk itu, dalam menghadapi hambatan, tantangan, dan ancaman pada kegiatan pengawasan diperlukan langkah-langkah strategis. Salah satu cara untuk menentukan langkah strategis tersebut adalah dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Analisis SWOT mendukung organisasi dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi internal dan eksternal ketika merancang rencana dan mengambil keputusan strategis, dengan menganalisis serta menempatkan sumber daya dan lingkungan organisasi dalam empat aspek utama: *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (Phadermrod *et al.*, 2016). Karya Tulis Tugas Akhir ini mencoba menerapkan analisis SWOT dalam perencanaan strategi pengawasan BKC HT ilegal pada KPPBC TMP C Sumbawa. Oleh karena itu, Karya Tulis Tugas Akhir ini diberi judul **“ANALISIS KEMUNGKINAN PENGGUNAAN ANALISIS SWOT DALAM PERENCANAAN STRATEGI PENGAWASAN BKC HT ILEGAL PADA KPPBC TMP C SUMBAWA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana narasi yang mungkin terjadi apabila analisis SWOT diterapkan dalam menentukan strategi pengawasan barang kena cukai (BKC) HT ilegal pada KPPBC TMP C Sumbawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan narasi yang mungkin terjadi apabila analisis SWOT diterapkan dalam menentukan strategi pengawasan barang kena cukai (BKC) HT ilegal pada KPPBC TMP C Sumbawa.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, ruang lingkup yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada wilayah kerja KPPBC TMP C Sumbawa yang berada di bawah Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT.
2. Penelitian ini terbatas pada lingkup pengawasan BKC HT ilegal yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Sumbawa.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi DJBC

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi DJBC sebagai referensi, khususnya KPPBC TMP C Sumbawa, untuk melakukan perencanaan strategi dalam meningkatkan kinerja di bidang pengawasan BKC HT ilegal.

2. Manfaat Bagi Lembaga Akademis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan memiliki kontribusi signifikan pada perkembangan salah satu tri dharma perguruan tinggi, yaitu bidang penelitian. Selain itu, penulis berharap bahwa hasil penulisan ini akan memberikan pengetahuan secara umum dalam hal cara penyusunan strategi dengan tepat melalui pembuktian penerapan teori dalam praktik.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang dalam pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang dasar hukum, teori yang digunakan, pengertian-pengertian, dan penelitian lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan deskripsi umum dari objek penulisan. Bab ini juga berisi mengenai pembahasan atas hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang dilakukan serta memberikan saran yang dapat dijadikan alternatif dalam menentukan strategi untuk mengatasi permasalahan yang ditemui yang berkaitan dengan penguatan penegakan hukum melalui pengawasan BKC HT ilegal pada KPPBC TMP C Sumbawa.